

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses komunikasi organisasi di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berdasarkan struktur organisasinya pada poin **4.1.2** yaitu dengan alur komunikasi atas-bawah, bahwa sebelum informasi diterima oleh seluruh pegawai, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberitahukan informasi tersebut kepada bidang yang bersangkutan seperti misalnya bagian umum dan yang menjadi penanggungjawab dalam bidang tersebut yang akan meneruskan informasi yang disampaikan kepada seluruh pegawai.
2. Proses komunikasi organisasi di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yaitu menggunakan komunikasi dua arah (*two way communication*) berdasarkan aturan yang ditetapkan. Jadi setiap apa yang menjadi perintah oleh pimpinan, seluruh pegawai berkesempatan memperbincangkannya terlebih dahulu terkait dengan perintah yang diberikan sebelum mengambil tindakan atas perintah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan fungsi perintah komunikasi organisasi bahwa anggota-anggota organisasi berhak dan berkewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah.

3. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bekerjasama membangun relasi dengan Lembaga Perbankan dan Satuan Kerja dalam hal APBN. Jadi ada hubungan personal yang dibangun oleh pegawai-pegawai di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan Lembaga lain dalam hal pekerjaan yang tentunya memengaruhi kinerja dari pegawai tersebut. Inilah yang dimaksud dengan fungsi relasional komunikasi organisasi bahwa komunikasi memperbolehkan anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif hubungan personal dengan anggota organisasi yang lain. Hubungan dalam pekerjaan tentu mempengaruhi kinerja (*job performance*) dalam berbagai cara.
4. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selalu ada mutasi atau beberapa pegawai yang dipindahtugaskan 2x dalam setahun. Hal ini membuat situasi menjadi tidak jelas sebab yang sering dipindahtugaskan adalah seseorang dalam suatu jabatan. Jadi setiap pegawai baru dan lama saling beradaptasi dengan situasi baru tersebut, yang tentunya dengan acar berkomunikasi satu sama lain. Inilah yang dimaksud dengan fungsi manajemen komunikasi organisasi yang dimana komunikasi sebagai alat untuk mengatasi ketidakjelasan.
5. Proses komunikasi di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender berada dalam koridor aturan dan kesepakatan sebab proses komunikasi dua arah yang digunakan mengikuti aturan yang ditetapkan. Pengelolaan komunikasi ini

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suranto Aw dalam bukunya *Komunikasi Organisasi Prinsip Komunikasi untuk Peningkatan Kinerja Organisasi* bahwa Tata kelola komunikasi adalah sistem pengaturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Sistem pengaturan tersebut dimaksud agar proses komunikasi organisasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dalam organisasi dan berfungsi sesuai dengan harapan, juga sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi

6. Proses komunikasi dua arah yang digunakan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dipercaya dapat mencapai sesuatu yang optimal. Suranto Aw menjelaskan bahwa sistem pengaturan tersebut menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik.
7. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal. Pelayanan internal, yaitu di bagian umum terkait dengan masalah keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Setiap pegawai negeri dan pegawai non pegawai negeri (PNPN) juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan disetiap minggunya. Sementara untuk pelayanan Eksternal yaitu ada pelayanan dari resepsionis untuk segala kepentingan. Selain itu juga ada Humas yang memberikan pelayanan di

Media Sosial. Hal ini telah sesuai dengan salah satu ciri tata kelola komunikasi yang baik seperti yang telah dikemukakan oleh Suranto Aw bahwa semua pemangku kepentingan baik publik internal maupun eksternal mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan prima secara berkelanjutan adalah salah satu ciri tata kelola komunikasi yang baik.

8. Suranto Aw juga menjelaskan bahwa Tata kelola komunikasi adalah sebuah kebijakan yang memiliki tujuan untuk menjamin pelayanan informasi berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusunlah perencanaan program atau kegiatan komunikasi, dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang menjadi input bagi organisasi tersebut, yaitu dari sumber daya manusia, norma dan aturan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan lain sebagainya. Pengarusutamaan Gender atau PUG ini sebagai salah satu kebijakan kesetaraan gender secara Internasional yang juga diterapkan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender ini, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
9. Langkah awal Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yaitu dalam bentuk rapat koordinasi regional (rakoreg) Sulawesi 2017 dengan mengundang Pakar Gender Nasional sebagai pemateri (komunikator). Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi memungkinkan diadakannya rapat tersebut juga sesuai dengan kebutuhan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Gorontalo untuk memperoleh arahan implementasi Pengarusutamaan Gender yaitu dengan mengundang pakar Gender Nasional sebagai yang paling paham tentang perspektif gender. Suranto Aw telah menjelaskan bahwa analisis situasi dalam tahap perencanaan yaitu kegiatan komunikasi yang direncanakan harus sesuai dengan situasi (kekuatan dan kelemahan) pada organisasi, serta sesuai dengan karakteristik lembaga atau individu yang akan menjadi sasaran dari komunikasi.

10. Pengumpulan informasi pada tahap perencanaan ini, bahwa informasi-informasi tersebut dianalisis dan dibahas bersama dalam rapat. Setiap pegawai berkesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang dibahas. Hal ini jelas bahwa keputusan tidak langsung ditetapkan begitu saja namun melibatkan setiap pegawai. Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Suranto Aw bahwa pengumpulan informasi pada tahap perencanaan perlu dianalisis kemudian sebagai pertimbangan untuk menetapkan prioritas kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis.

11. Kegiatan komunikasi dalam tahap perencanaan implementasi Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini berlangsung secara tatap muka. Informan 02 telah menjelaskan bahwa media yang digunakan untuk implementasi Pengarusutamaan Gender yaitu media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi seperti *Whatsapp Group*, dan lain-lain. Mereka juga menggunakan Aplikasi *Trending DJPB* (Ditjen Perbendaharaan) dan media cetak sebagai sarana informasi. Tahap perencanaan tata kelola komunikasi

dikemukakan oleh Suranto Aw bahwa media yang digunakan untuk memperlancar penyampaian informasi haruslah dipilih dengan tepat dan efisien sesuai dengan karakteristik penerima.

12. Strategi penyampaian pesan yang digunakan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yaitu mengikuti aturan bahwa kegiatan komunikasi berjalan dua arah. Suranto Aw telah menjelaskan tahap perencanaan tata kelola komunikasi dalam mengorganisasikan pesan, yaitu strategi penyampaian pesan harus tepat.
13. Kegiatan komunikasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender pada tahap pelaksanaan yang pertama yaitu dalam bentuk rapat penyusunan kembali perubahan Tim implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan Duta PUG (Pengarusutamaan Gender) dengan menambahkan 3 Duta PUG (Pengarusutamaan Gender). Rapat ini dilakukan karena ada pejabat/pegawai yang dipindahtugaskan. Oleh karena itu mereka harus menyesuaikan dengan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat langsung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan mampu mengatasi perubahan. Suranto Aw telah menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi pada tahap pelaksanaan senantiasa bersifat adaptif dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang *real* terjadi.
14. Informasi-informasi yang diperoleh dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sudah di standarkan, atau ditetapkan oleh

ketetapan peraturan, jadi informasi tersebut terbukti aktual, dan terkait penambahan informasi yang lebih dalam, informasi tersebut diperoleh langsung dari ahlinya. Suranto Aw menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi-informasi teraktual perlu menjadi perhatian.

15. Media yang digunakan dalam Implementasi Pengarusutaman Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo hampir tidak memiliki kendala. Kecuali di awal terkait penggunaan aplikasi untuk kuis, kendalanya yang rentang yaitu di usia *Baby Boomer*. Setiap pegawai yang memahami aplikasi tersebut membantu untuk mengatasi kendala tersebut. Suranto Aw menjelaskan bahwa perlu dilakukan pencermatan, jika media yang direncanakan ternyata mengalami kendala, maka perlu segera mencari solusinya agar penyampaian informasi tersebut tetap berjalan dengan lancar. Ia juga menjelaskan bahwa pada situasi tertentu perlu adanya revisi cara penyampaian pesan sesuai keadaan yang terjadi di lapangan. Revisi penyampaian pesan dalam Implementasi Pengarusutaman Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini dilakukan pada tahap evaluasi yang dilaksanakan disetiap bulannya.

16. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selalu melakukan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender dengan mengadakan rapat bulanan untuk memantau dan mereview progress implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) apakah sudah sejalan dengan *Road Map*, ada rapat *Kick Off* persiapan penilaian lomba

Implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) tingkat Kementerian Keuangan, guna mematangkan persiapan penilaian lomba implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) Kantor vertikal tahun 2019, ada rapat koordinasi untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang telah dilaksanakan dan menyusun strategi ke depan sesuai apa yang telah direncanakan. Rapat-rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Suranto Aw menjelaskan dalam bukunya *Komunikasi Organisasi Prinsip Komunikasi untuk Peningkatan Kinerja Organisasi* bahwa Tata Kelola Komunikasi bahwa perlu dilakukan evaluasi secara objektif untuk memperoleh informasi tingkat keberhasilan kegiatan komunikasi.

1.2 Saran

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo atau setiap atasan yang dipilih untuk memimpin rapat, tetap mempertahankan kegiatan komunikasi sesuai aturan kesepakatan yaitu komunikasi dua arah., karena dipercayai lebih optimal dengan melibatkan para pegawai dalam pengambilan keputusan. Proses komunikasi seperti ini dapat menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola komunikasi organisasi.
2. Pelayanan yang diberikan baik internal maupun eksternal juga dipertahankan, sebab salah satu ciri tata kelola komunikasi yang baik adalah

semua pemangku kepentingan baik publik internal dan eksternal mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan prima secara berkelanjutan.

3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo harus mempertahankan melakukan evaluasi terhadap kegiatan apapun. Karena sudah menjadi tanggungjawab seorang pemimpin, agar dapat memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan komunikasi.
4. Melihat dari perspektif gender, alangkah baiknya untuk Duta Pengarusutamaan Gender diseimbangkan sebab yang menjadi tujuan dari implementasi Pengarusutamaan Gender itu sendiri adalah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.